

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan pada Komunitas Makassar Women Studies

Sopian Tamrin^{1*}, Idham Irwansyah², Firdaus Suhaeb³, Mauliadi Ramli⁴, Riri Amandaria⁵

Keywords :

Perempuan, Keterwakilan dan Kepemimpinan

Correspondence Author

Sosiologi UNM^{1,2,3,4},
e-mail : sopiantamrin@unm.ac.id*

History Artikel

Received: 18-3-2022;

Reviewed: 22-4-2022

Revised: 28-4-2022

Accepted: 06-5-2022

Published: 07-5-2022

Abstrak. Kesetaraan gender sebagai tujuan kelima pembangunan berkelanjutan telah ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui laporan Voluntary National Review. Laporan rutin tersebut telah mencatat kemajuan setiap negara sebagai pencapaian SDGs yang kemudian sampaikan dalam forum politik tingkat tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa. Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik karena masih mengakar kuatnya budaya patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Cara pandang patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di banyak aspek termasuk politik. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen (afirmatif action) menjadi syarat mutlak bagi terciptanya budaya pengambilan kebijakan publik yang peka terhadap kepentingan perempuan. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Itulah sebabnya upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan menjadi sebuah keharusan. Karena pada dasarnya partisipasi perempuan yang diharapkan tidak sekedar soal jumlah tetapi tentu dibarengi dengan kualitas..

Abstract. Gender equality as the fifth goal of sustainable development has been determined by the United Nations through the Voluntary National Review report. These routine reports have recorded the progress of each country as the achievement of the SDGs which is then conveyed in the high-level political forum of the United Nations. The low representation of women in politics is due to the strong patriarchal culture in most Indonesian society. The patriarchal perspective tends to place women under the power of men. Women are imaged as well as positioned as parties who do not have autonomy and independence in many aspects, including politics.

The presence of women in the realm of practical politics as evidenced by the representation of women in parliament (affirmative action) is an absolute requirement for the creation of a culture of public policy-making that is sensitive to women's interests. The lack of representation of women in parliament in sufficient numbers, the tendency to put men's interests at the center of policy making will be difficult to stem. That is why efforts to increase women's leadership capacity are a must. Because basically the expected participation of women is not only a matter of quantity but of course accompanied by quality.



Pendahuluan

Kesetaraan gender sebagai tujuan kelima pembangunan berkelanjutan telah ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui laporan *Voluntary National Review*. Laporan rutin tersebut telah mencatat kemajuan setiap negara sebagai pencapaian *SDGs* yang kemudian disampaikan dalam forum politik tingkat tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa. Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik karena masih mengakar kuatnya budaya patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Cara pandang patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di banyak aspek termasuk politik.

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen (*afirmatif action*) menjadi syarat mutlak bagi terciptanya budaya pengambilan kebijakan publik yang peka terhadap kepentingan perempuan. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.

Menurut Priandi dan Roisah, (2019) Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan

Praktik politik patriarkis ini tumbuh subur dan cenderung ditanggapi secara permisif lantaran dilatari oleh sejumlah hal. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, patriarki sudah menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan, perempuan yang nyaris selalu menjadi pihak pesakitan alias korban atas budaya patriarki tersebut pun lebih sering hanya menerimanya sebagai kodrat. Budaya patriarki kian mendapat pembenarannya ketika penafsiran ajaran agama pun dalam banyak hal lebih berpihak pada kepentingan laki-laki.

Rantai marjinalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah.

Menurut Siti Musdah Mulia (2007), rendahnya partisipasi politik perempuan juga dilatari oleh adanya pemahaman dikotomistik tentang ruang publik dan ruang domestik. Bagi sebagian besar perempuan, terutama di level akar rumput dan pedesaan di mana mayoritas perempuan hidup, politik kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan. Politik juga kerap diidentikkan dengan kemandirian, kebebasan berpendapat dan agresivitas yang umumnya lekat dengan citra maskulin.

Lebih dari itu, perempuan desa pada umumnya juga belum sepenuhnya memahami esensi demokrasi dan pentingnya pemilu sebagai salah satu sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang adil, sejahtera dan demokratis. Secara statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa, dan sekitar 50 persen di antaranya merupakan penduduk perempuan. Namun, dari pemilu ke pemilu, peta kekuasaan terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan tren negatif.

Peminggiran peran perempuan dalam kontestasi perempuan pada dasarnya merupakan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan. Deklarasi New Delhi 1997 menegaskan bahwa hak politik perempuan harus dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Ini artinya, jika kita mengakui hak asasi manusia, tidak ada alasan untuk kita tidak mengakui dan memfasilitasi hak politik perempuan.

Dalam lingkup yang lebih luas, diperlukan pula sebuah gerakan yang membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya praktik politik berbasis keadilan gender. Persepsi publik bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak cocok dengan dunia politik mutlak harus diakhiri. Begitu pula tafsir keagamaan yang cenderung mengidentikkan kepemimpinan

dengan maskulinitas idealnya harus digeser ke perspektif yang lebih sensitif gender.

Perwakilan politik perempuan dapat diartikan sebagai kehadiran anggota kelompok tertentu (perempuan) dalam lembaga-lembaga politik formal. Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan masyarakat yang memilihnya atau yang akan memilih mereka di waktu mendatang.

Kondisi itu menguatkan fakta bahwa kaum hawa hanya menjadi ornamen pelengkap syarat 30 persen keterwakilan perempuan. Secara substansial, narasi politik partai politik masih sangat maskulin. Partai politik belum mampu menempatkan perempuan secara proporsional dengan laki-laki, khususnya dalam nomor urut caleg.

Perwakilan politik perempuan harus mengarah pada perwakilan substantif, bukan diskriminatif. Perwakilan substantif mengarahkan perhatian pada ide mengenai kepentingan-kepentingan perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan diharapkan dapat memadai sesuai dengan porsinya.

Rahmatunnisa, (2015) menyatakan Proses pemberdayaan yang intensif dan terus-menerus bagi perempuan legislator sendiri melalui berbagai proses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan serta kepekaan mereka sebagai wakil perempuan.

Permasalahan Mitra

Perempuan masih seringkali diragukan dalam hal keterlibatannya pada ruang publik apalagi dalam kepemimpinan politik. Perempuan masih dianggap anak bungsu dalam politik yang tak cukup cekatan dan cakap menangani persoalan publik. Ia masih saja dilihat sebagai second sex (gender kedua) di tengah masyarakat. Pandangan ini berimplikasi pada ruang yang diperoleh perempuan ditengah-tengah masyarakat.

Ketatnya ruang sosial bagi perempuan tak lepas dari akar kultural masyarakat Bugis Makassar yang patriarki. Belum lagi regulasi UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat belum membuahkan hasil maksimal.

Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan (Palulungan, 2017)

Persentase 30% itu masih sangat prosedural dan tak cukup signifikan membawa perempuan terpilih menjadi anggota DPRD. Mereka harus berkontestasi dengan 70% laki-laki yang ada dalam partai tersebut olehnya itu angka 30% tidak pernah maksimal dalam parlemen karena peluangnya hanya 30% pada setiap partai. Belum lagi proses rekrutment juga terkesan prosedural dan instan. Sehingga angka tersebut belum tentu merepresentasikan perempuan terbaik ditengah masyarakat. (Palulungan, 2017)

Kondisi perempuan tidak sekedar terbilang lemah pada aspek kultural tapi juga pada aspek supradesadaran. Pahaman perempuan terhadap dirinya sendiri juga masih minim sehingga motivasi mereka untuk berpartisipasi juga minim. Padahal motivasi juga menjadi satu faktor dominan yang mendorong partisipasi keterlibatan perempuan dalam politik. tingkat partisipasi harus didorong agar perempuan memiliki pengalaman yang samayang menempa laki-laki dalam proses politik. Inilah sekelumit masalah yang dihadapi perempuan saat ini. Olehnya itu tim pengabdian bekerja sama dengan komunitas *Makassar Women Studies* untuk melakukan pelatihan kepemimpinan politik perempuan.

Sebagaimana Idham, (2020) bahwa masyarakat harus memiliki karakter yang kuat yang meliputi iman dan takwa, rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, serta kesadaran sosial dan budaya. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini semakin meneguhkan pentingnya penguatan literasi dasar, kompetensi, dan karakter bangsa Indonesia.

Permasalahan Prioritas yang Harus Ditangani

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada bagian identifikasi masalah di atas, maka permasalahan prioritas yang perlu segera

mendapatkan penanganan adalah pemahaman perempuan terhadap dirinya, motivasi, partisipasi politik dan peran-peran politik perempuan dalam ruang publik.

Keterwakilan perempuan memang telah diundangkan, tetapi masih menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik dalam memenuhi kuota perempuan.

Partai politik masih memeras keringat dalam proses pemenuhannya. Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik masih menjadi tantangan yang tak mudah bagi perempuan. Fenomena rendahnya keterwakilan politik perempuan sangat nyata terjadi. Sebagai contoh pada Pemilu 2014 lalu, dari total 560 kursi DPR, hanya menghasilkan 97 anggota DPR perempuan. Hal senada terjadi pada Pemilu 2009, di mana jumlah perempuan di parlemen hanya mencapai 103 orang. Keterwakilan perempuan di wilayah legislatif ini bahkan mengalami degradasi, yakni dari posisi 18,2 persen (2009) menjadi 17,3 persen (2014) (Detik.com, 2018)

Budaya patriarki dalam kehidupan politik kita masih menjadi salah satu batu sandungan bagi ketertinggalan politik perempuan. Tafsiran bahwa perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (privat) sementara laki-laki untuk wilayah publik masih menjadi paham klasik sebagian masyarakat (Arivia, 2018)

Di samping itu, rendahnya angka representasi perempuan di ruang politik tak bisa dilepaskan dari pengaruh platform partai politik itu sendiri. Setiap jelang pemilu hampir semua parpol mencoba untuk menerapkan perspektif gender. Namun, upaya tersebut tak akan cukup efektif jika masih ada anggapan tunggal bahwa hanya bertujuan mempertahankan eksistensi partai supaya sesuai dengan persyaratan undang-undang. Belum lagi tantangan yang dihadapi kaum perempuan saat berkontestasi. Olehnya itu melalui pelatihan ini tim pengabdian bekerja sama dengan komunitas *Makassar Women Studies* akan melakukan pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan yang ada di kota makassar.

A. Solusi Dan Target Luaran

Solusi

1. Peserta memiliki pengetahuan dalam memahami makna perempuan secara pribadi dan sosial
2. Peserta memiliki kesadaran politik
3. Peserta memiliki keterampilan dan kemampuan kepemimpinan dalam politik
4. Peserta memiliki motivasi politik

Luaran

Adapun luaran dalam pelaksanaan PPM tersebut adalah agar perempuan dapat menjadi pemimpin dalam ruang publik khususnya dalam bidang politik. Perempuan diharapkan agar bisa tampil dalam kehidupan sosial masyarakat tidak semata pelengkap melainkan mengambil posisi penting. Setelah pelatihan ini peserta juga diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya dalam masyarakat pada umumnya dan bidang politik pada khususnya.

Pelatihan tidak hanya mengharap target konkrit yang bisa diukur secara kuantitatif. Kegiatan berupaya meningkatkan termotivasi dan semangat perempuan kapan dan dimanapun mereka mengambil peran. Olehnya itu pengabdian ini dianggap cukup penting bagi perempuan apalagi perempuan yang berkeinginan aktif dalam perpolitikan.

Metode Pengabdian

Kegiatan dikemas dalam bentuk forum yang akan menghadirkan pembicara yang berkualifikasi dalam bidang keperempuanan. Forum ini akan mewadahi perempuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dengan menggunakan berbagai perspektif. Agar diskusi berlangsung maksimal dan bisa mencapai tujuan pengabdian maka Metode yang Ditawarkan melalui diskusi dan sharing. Sharing pertama akan disampaikan oleh narasumber kemudian dilanjutkan dengan sharing dari peserta sekaligus merespon materi yang disampaikan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui pelatihan dengan model

dialogis yang memberikan ruang pada peserta untuk interaktif dalam membincang tema kepemimpinan perempuan.

Adapun skema materi yang akan disampaikan dalam pelatihan adalah sebagai berikut;

a. Pengenalan Konsep Keperempuan

Pada materi ini pembicara akan menguraikan konsep dasar perempuan dari berbagai perspektif. Materi ini diupayakan bisa menyentuh kedalaman makna perempuan untuk membangun cara pandang peserta terhadap perempuan.

b. Potensi Kepemimpinan Perempuan

Materi ini berupaya menguraikan aspek potensial perempuan yang nantinya akan dijadikan sebagai prioritas pengembangan dalam mendorong kemampuan kepemimpinan perempuan dalam politik.

c. Perempuan dalam Politik

Materi ini mencoba menjelaskan korelasi perempuan dan politik. Materi ini peserta diharapkan mendapatkan argumentasi logis dalam menemukan keterkaitan perempuan dengan politik.

d. Motivasi Keperempuan

Pada aspek motivasi juga menjadi satu bagian penting dalam tahap pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan. Materi motivasi ini berorientasi pada tumbuhnya semangat, rasa percaya diri bagi perempuan setelah memperoleh pahaman dari materi sebelumnya. Motivasi menyentuh kedalaman psikologis yang akan memantik reaksi aktif perempuan dalam terlibat dalam proses politik khususnya pada kepemimpinan politik.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil yang dicapai

Pemberian pelatihan kepada anggota komunitas *Makassar Women Studies*, dalam kaitannya dengan peningkatan wawasan, pengembangan potensi dan mendorong partisipasi perempuan di tengah-tengah masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan dengan pelaksana dari

Universitas Negeri Makassar adalah bagian dari sikap kepedulian dalam menyikapi masalah yang dihadapi oleh perempuan Bugis Makassar pada ruang publik.

Selain itu upaya ini merupakan bagian untuk menyadarkan perempuan yang terkungkung oleh pemahaman patriarki yang dominan pada kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Selain itu, Pendidikan politik menurut Widiyaningrum, (2020) dapat meningkatkan keterampilan politik perempuan.

Pemberian pelatihan kepada anggota komunitas *Makassar Women Studies*, dilakukan dengan metode yang bervariasi, hal mana pelaksana menyampaikan materi.

Dengan ceramah: memotivasi, merangsang kemampuan kepekaan, dan kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk merespon materi dengan bertanya atau menjawab. Metode ini cukup efektif dalam merangsang partisipasi perempuan dalam menghidupkan diskusi dan percakapan yang menyenangkan. Materi yang disampaikan dalam pelatihan adalah materi yang berkaitan dengan konsep dasar perempuan, potensi perempuan dan bentuk partisipasi perempuan.

Lewat pelatihan ini dapat memberikan pemahaman perempuan dari perspektif filosofis, sosial, agama dan budaya. Selain itu, perempuan akan diarahkan untuk mengetahui potensi masing-masing. Pada tahap selanjutnya peserta akan diberikan motivasi agar bisa berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kita harapkan dari proses pengabdian ini, perempuan tidak sekedar dibekali wawasan melainkan juga berupaya mendorong keterlibatan diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

Apa yang telah tim pengabdian lakukan sudah berdasar dengan observasi awal yang kemudian ditindaklanjuti sekaligus diputuskan sebagai mitra yang tepat untuk

membahas problem perempuan. Hal ini memiliki lada yang kuat bahwa perempuan masuk sebagai prioritas dalam pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Hanya saja tentu kegiatan ini tidak serta merta mengubah kondisi sepenuhnya. Kegiatan ini hanyalah sikap dari upaya untuk mengambil bagian dalam mengatasi persoalan sosial yang berkembang. Sebagaimana rencana pengabdian pelatihan kepemimpinan perempuan ini maka tabel dibawah ini akan menunjukkan masalah yang diatasi, upaya yang dilakukan dan capaian;

Masalah	Target capaian
Perempuan B ugis Makassar m asih banyak yang dihantui ketakutan menjadi pemimpin.	Perempuan khususnya masyarakat bugis makassar berani menjadi pemimpin publik terkhusus dibidang politik.
Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik	Perempuan signifikan dalam ruang publik terkhususnya pada soal distribusi kepemimpinan
Stigma laki-laki terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan khususnya dalam bidang politik	Perempuan tidak terkooptasi stigma yang membuat mereka tidak terlalu aktif dalam kehidupan masyarakat
Problem pemahaman perempuan terhadap diri sendiri	Perempuan memiliki pemahaman yang matang perihal dirinya sendiri.

B. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut;

Lokasi pengabdian mudah dijangkau karena tidak terlalu jauh dari pusat kota.

Peserta pelatihan memiliki motivasi yang tinggi
Pemateri cukup pengalaman dan mumpuni pada tema keperempuanan

Pelatihan sangat interaktif karena peserta berasal dari komunitas kajian keperempuanan

Bantuan dana dari Lembaga Pengabdian UNM

Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Peserta yang hadir dalam pelatihan dari latar belakang ilmu dan pengalaman yang berbeda.

Tempat pelaksana pengabdian kurang kondusif karena berada di pinggir jalan sehingga pelatihan terganggu dengan suara kendaraan yang lalu lalang

Tempat pelaksanaan kegiatan tidak terlalu representatif karena sempit.

4. Tempat pelatihan tidak memiliki fasilitas untuk mengakses internet sehingga beberapa video inspiratif dari youtube tidak dapat ditampilkan.

5. Keterbatasan referensi perihal tema kepemimpinan perempuan pada masyarakat bugis Makassar

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang memaksimalkan proses pengabdian ini khususnya mitra *Makassar Women Studies*.

Simpulan dan Rekomendasi

1. Budaya patriarki dalam kehidupan politik kita masih menjadi salah satu batu sandungan bagi ketertinggalan politik perempuan. Tafsiran bahwa perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (privat) sementara laki-laki untuk wilayah publik masih menjadi paham klasik sebagian masyarakat.
2. Perempuan perlu didorong berperan aktif dalam keterlibatan di ruang publik untuk meminimalisir kesenjangan dan citra lemah perempuan di tengah-tengah masyarakat. Pelatihan ini setidaknya memberikan pemahaman

perempuan mengenai berbagai perspektif terhadap perempuan.

3. Perempuan masih seringkali diragukan dalam hal keterlibatannya pada ruang publik apalagi dalam kepemimpinan politik. Perempuan masih dianggap anak bungsu dalam politik yang tak cukup cekatan dan cakap menangani persoalan publik. Ia masih saja dilihat sebagai *second sex* (gender kedua) di tengah masyarakat. Pandangan ini berimplikasi pada ruang yang diperoleh perempuan ditengah-tengah masyarakat.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah bersama-sama mendorong partisipasi perempuan dengan memberikan ruang dalam bentuk program pelatihan dan pemberdayaan.
2. Seharusnya pelatihan selanjutnya bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam menginisiasi pelatihan dengan merangkul berbagai komunitas keperempuanan khususnya di kota makassar.

Daftar Pustaka

- Arivia, G. (2018) *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: YJP Press.
- Detik.com (2018) *Kampanye Efektif Caleg Perempuan*, News Detik.Com.
- Idham. 2019. *Pelatihan Literasi Digital pada Komunitas Mata Literasi bagi Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Gowa*. Jurnal Humanis. Volume 18. N. 02. Hal. 6 - 8.
- Idham (2020) 'PKM Gerakan Literasi Keluarga (GLK) pada Ibu Rumah Tangga di Kampung KB Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus Covid-19', *Jurnal Humanis*, V.19(N.02.), pp. 8–65.
- Mulia, S. M. (2007) *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibra Press.
- Palulungan, L. (2017) *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Makassar: Yayasan BaKTI.
- Priandi, R. and Roisah, K. (2019) 'Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), p. 106. doi: 10.14710/jphi.v1i1.106-116.
- Rahmatunnisa, M. (2015) 'Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia', *Seminar Pendidikan Politik bagi Remaja Perempuan*, pp. 1–10. Available at: <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/8-Pentingnya-Partisipasi-Politik-Perempuan1.Pdf>.
- Tokan, F., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 206-225. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Widiyaningrum, W. Y. (2020) 'Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis', *Jisipol | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2 SE-Articles), pp. 126–142. Available at: <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>.